



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT No: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Dukungan *USAID Oceans* bagi Indonesia dalam  
Menghadapi SIMP (2015-2020)**

Skripsi

Oleh

Veronica Tasya

6091801051

Bandung

2022



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT No: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Dukungan *USAID Oceans* bagi Indonesia dalam  
Menghadapi SIMP (2015-2020)**

Skripsi

Oleh

Veronica Tasya

6091801051

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Veronica Tasya  
Nomor Pokok : 6091801051  
Judul : Dukungan *USAID Oceans* bagi Indonesia dalam Menghadapi SIMP (2015-2020)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Selasa, 28 Juni 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. phil. Aknolt Kristian Pakpahan, MA

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M. A.

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

:   
\_\_\_\_\_

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Veronica Tasya  
Nomor Pokok : 6091801051  
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Dukungan *USAID Oceans* bagi Indonesia dalam Menghadapi SIMP (2015-2020)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Juni 2022  
Tanda Tangan



Veronica Tasya

## ABSTRAK

Nama : Veronica Tasya  
NPM : 6091801051  
Judul : Dukungan *USAID Oceans* bagi Indonesia dalam Menghadapi SIMP (2015-2020)

---

Amerika Serikat memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu pengelolaan laut yang berkelanjutan seperti penyelesaian masalah *IUU fishing* dan *seafood fraud* menjadi salah satu faktor pendorong Amerika Serikat untuk mengembangkan program ketertelusuran untuk komoditas dan produk makanan laut yang dikenal dengan *Seafood Import Monitoring Program* (SIMP). Indonesia memiliki kepentingan dalam kebijakan SIMP tersebut mengingat bahwa Indonesia merupakan negara eksportir utama untuk produk perikanan ke Amerika Serikat. Ketertelusuran yang merupakan persyaratan utama dalam kebijakan SIMP memiliki potensi untuk menciptakan hambatan terhadap ekspor produk perikanan Indonesia. Dalam penelitian, penulis menggunakan konsep hambatan teknis, kerjasama internasional dan bantuan luar negeri untuk menjabarkan dukungan *USAID Oceans* dalam membantu Indonesia menghadapi SIMP sebagai hambatan teknis perdagangan bagi ekspor perikanan Indonesia. Penulis menemukan untuk membantu mengatasi keterbatasan Indonesia dalam menghadapi SIMP, Amerika Serikat melalui *United States Agency for International Development* (USAID) menciptakan *USAID Oceans and Fisheries Partnership* (*USAID Oceans*) yang merupakan proyek regional lima tahun di kawasan Asia-Pasifik. Di Indonesia semua kegiatan dalam proyek dilaksanakan di kota Bitung yang dipilih menjadi lokasi implementasi uji coba dan penerapan dari kegiatan proyek *USAID Oceans* dengan kerjasama pemerintah pusat Indonesia yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mitra swasta, dan lembaga non-pemerintah lainnya. Upaya *USAID Oceans* dalam membantu Indonesia menghadapi SIMP ini dilakukan melalui dukungan ketertelusuran, perbaikan manajemen perikanan, penguatan kerjasama melalui keterlibatan swasta dan publik, serta pemberdayaan SDM perikanan.

Kata Kunci : Indonesia, Amerika Serikat, SIMP, Perikanan, Hambatan Teknis Perdagangan

## **ABSTRACT**

*Name* : Veronica Tasya  
*Student Number* : 6091801051  
*Title* : *USAID Oceans Support for Indonesia in Facing SIMP (2015-2020)*

---

*The United States has great attention to sustainable marine management issues such as solving the problem of IUU fishing and seafood fraud which is one of the driving factors for the United States to develop a traceability program for seafood commodities and products known as the Seafood Import Monitoring Program (SIMP). Indonesia has an interest in the SIMP policy given that Indonesia is a major exporter of fishery products to the United States. Traceability, which is a key requirement in SIMP policies, has the potential to create barriers to Indonesian fishery product exports. In this study, the author uses the concepts of technical barriers, international cooperation, and foreign assistance to describe USAID Oceans' support in helping Indonesia face SIMP as a technical trade barrier for Indonesian fishery exports. The author found that to help overcome Indonesia's limitations in dealing with SIMP, the United States through the United States Agency for International Development (USAID) created the USAID Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans) which is a five-year regional project in the Asia-Pacific region. In Indonesia, all activities in the project were carried out in the city of Bitung, which was chosen as the location for the pilot implementation and implementation of the USAID Oceans project activities in collaboration with the Indonesian central government, namely the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP), private partners, and other non-governmental organizations. USAID Oceans' efforts to help Indonesia deal with SIMP are carried out through traceability support, improving fisheries management, strengthening collaboration through private and public involvement, and empowering fishery human resources.*

*Keywords: Indonesia, United States of America, SIMP, Fisheries, Technical Barriers to Trade*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dukungan *USAID Oceans* bagi Indonesia dalam Menghadapi SIMP (2015-2020)” dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Keluarga tercinta, Papa , Mama , Serena , Marcello , dan Jovan yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun materiil, serta doa dalam segala aspek kehidupan penulis dari dulu sampai sekarang.
2. Bapak Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan yang berguna selama penulisan skripsi ini.
3. Ibu Vrameswari Omega Wati, S.I.P., M.Si (Han) selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).
4. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).
5. Seluruh sahabat dan teman-teman (Brid, Elvira, Jennifer, Fero) yang selalu memberikan dukungan dan semangat pada saat penulisan skripsi ini
6. Seluruh sahabat dan teman-teman KPUP PUPM UNPAR (Gerry dan Santo) yang selalu memberikan dukungan dan semangat di masa-masa kuliah
7. Seluruh mahasiswa dan mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional angkatan

2018 sebagai teman seperjuangan penulis.

8. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung dan tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengalaman, sarana dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menerima segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya bagi pihak-pihak terkait.

Bandung, 9 Juni 2022



Veronica Tasya

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.2.1. Deskripsi Masalah	3
1.2.2. Pembatasan Masalah	5
1.2.3. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian	6
1.4. Kajian Literatur	7
1.5. Kerangka Pemikiran	13
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	22
1.6.1. Metode Penelitian	22
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	23
1.7. Sistematika Pembahasan	23
<b>BAB II. POTENSI DAN PERMASALAHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA</b>	<b>26</b>
2.1. Profil Wilayah Laut Indonesia	26
2.2. Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia	29
2.2.1. Potensi Laut Indonesia	29
2.2.2 Karakteristik dan Potensi Perikanan Indonesia	32
2.3. Kontribusi Sektor Perikanan dalam Perekonomian Indonesia	34
2.4. Permasalahan Sumber Daya Ikan Indonesia	42
<b>BAB III. SEAFOOD IMPORT MONITORING PROGRAM SEBAGAI HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN EKSPOR PERIKANAN INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT</b>	<b>46</b>
3.1. Kebijakan Seafood Import Monitoring Program	46
3.1.1. Motivasi Amerika Serikat	46

3.1.2. Regulasi Seafood Import Monitoring Program	55
3.2. Kinerja Ekspor Perikanan Indonesia ke Amerika Serikat	63
3.3. Langkah Indonesia dalam Menghadapi SIMP	66
3.4. Tantangan Indonesia dalam Menghadapi Seafood Import Monitoring Program	69
<b>BAB IV. PROYEK USAID OCEANS UNTUK MENDUKUNG INDONESIA MENGHADAPI HAMBATAN TEKNIS SEAFOOD IMPORT MONITORING PROGRAM</b>	<b>74</b>
4.1. Gambaran Proyek USAID Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans)	75
4.1.1. Latar Belakang Pembentukan USAID Oceans	76
4.1.2. Kegiatan dan Cakupan Wilayah USAID Oceans	78
4.2. Pemilihan Bitung sebagai Learning Sites dari Proyek USAID Oceans	81
4.3. Upaya USAID Oceans di Bitung untuk Mendukung Indonesia Menghadapi Hambatan Teknis Perdagangan Seafood Import Monitoring Program	87
4.3.1. Dukungan Ketertelusuran (traceability) melalui Implementasi Pendekatan Catch Documentation and Traceability (CDT)	89
4.3.2. Perbaikan Manajemen Perikanan melalui Implementasi Pendekatan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM)	98
4.3.3. Penguatan Kerjasama melalui Implementasi Pendekatan Public Private Partnership	102
4.3.4. Pemberdayaan SDM Perikanan melalui Implementasi Pendekatan Human Welfare	106
<b>BAB V. KESIMPULAN</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Populasi Nelayan Indonesia Tahun 2010 - 2015	35
Tabel 2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut Sumber Tahun 2015 dan 2016	41
Tabel 3.1. Konsumsi Produk Perikanan Paling Populer Di Amerika Serikat (pon/pounds) Tahun 2014	48
Tabel 3.2. Perkembangan Ekspor Perikanan Indonesia ke Amerika Serikat 2012-2017	64

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Kontribusi Perikanan Terhadap PDB Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2010-2014	38
Grafik 2.2. Perkembangan Volume Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Perairan Tahun 2010-2014	39
Grafik 3.1. Neraca Perdagangan AS dalam Produk Perikanan yang Dapat Dimakan, 2005-2014	51

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Laut Indonesia	27
Gambar 3.1. Alur dari Rantai Pasok Perikanan Indonesia	71
Gambar 4.1. Peta Perairan WPP-RI 716	82
Gambar 4.2. Skema Pemakaian Teknologi eCDT USAID Oceans dalam memenuhi persyaratan nasional dan internasional untuk ekspor produk perikanan	91
Gambar 4.3. Pemasangan Teknologi Ketertelusuran Pointrek VMS di atas Kapal	93
Gambar 4.4. Pengoprasian teknologi ketertelusuran TraceTales pada Produk Makanan Laut Olahan	94

## DAFTAR SINGKATAN

CDT	:	<i>Catch Documentation and Traceability</i>
eCDT	:	<i>Electronic Catch Documentation And Traceability</i>
EAFM	:	<i>Ecosystem Approach to Fisheries Management</i>
IUU Fishing	:	<i>Illegal, Unreported and Unregulated fishing</i>
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
SIMP	:	<i>Seafood Import Monitoring Program</i>
TBT	:	<i>Technical Barriers To Trade</i>
USAID	:	<i>United States Agency for International Development</i>
USAID Oceans	:	<i>USAID Oceans and Fisheries Partnership</i>
WPP-RI	:	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Secara geografis, Indonesia mendapatkan predikat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.499 pulau, luas total wilayah Indonesia mencapai 7,81 juta kilometer persegi (km<sup>2</sup>), tiga perempatnya merupakan wilayah laut yaitu sebesar 3,25 juta kilometer persegi (km<sup>2</sup>), sementara sisanya sebesar 2,01 juta kilometer persegi (km<sup>2</sup>) merupakan wilayah daratan.<sup>1</sup> Luasnya wilayah laut Indonesia yang jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah daratnya, pastinya akan mempengaruhi potensi dari sumber daya alam yang dimilikinya. Melimpahnya potensi sumber daya alam kelautan membuat Indonesia menjadi negara penghasil perikanan terbesar kedua di dunia setelah Cina. Dibuktikan pada tahun 2014, dengan produksi perikanan tangkap Indonesia yang mencapai sebesar 6 juta ton.<sup>2</sup> Berdasarkan jumlah ketergantungan terhadap ikan, Indonesia menjadi negara terbesar kedelapan di dunia yang bergantung pada ikan sebagai penghasil protein hewani.<sup>3</sup> Hal ini membuat sektor perikanan dapat menjadi kontributor yang penting untuk mendukung perekonomian Indonesia.

---

<sup>1</sup> Oki Pratama, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia", Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, diakses 3 Maret 2022  
<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>

<sup>2</sup> "Indonesia Produsen Ikan Laut Kedua Terbesar Dunia".katadata.co.id. 28 September 2016. diakses 3 Maret 2022  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/28/indonesia-produsen-ikan-laut-kedua-terbesar-dunia>

<sup>3</sup> Bennett, Abigail, et.al. "Contribution of Fisheries to Food and Nutrition Security: Current Knowledge, Policy, and Research," NI Report 18-02, Durham, NC: Duke University, 2018

Potensi sumber daya alam kelautan Indonesia ini juga menjadi primadona bagi negara - negara lainnya, termasuk Amerika Serikat yang menjadi pasar tujuan utama bagi komoditas ikan Indonesia. Selama periode 2009 - 2013 terjadi peningkatan jumlah volume ekspor hasil perikanan Indonesia ke pasar Amerika Serikat dari yang awalnya di tahun 2009 sebesar 125.929 ton menjadi sebesar 136.847 ton di tahun 2013.<sup>4</sup> Sejak 2009, Amerika Serikat telah mengimpor produk perikanan dalam jumlah yang besar yaitu dengan nilai impor yang mencapai 13,8 miliar dolar AS dan angka ini terus meningkat tiap tahunnya.<sup>5</sup> Sebagai negara importir produk perikanan terbesar di dunia, tidak salah jika Amerika Serikat menaruh perhatian yang besar terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan laut yang berkelanjutan seperti penyelesaian masalah penangkapan ikan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* dan penipuan produk makanan laut *seafood fraud*. Perhatian yang besar terhadap isu tersebut menjadi salah satu faktor pendorong Amerika Serikat untuk mengembangkan program ketertelusuran untuk komoditas dan produk perikanan yang dikenal dengan sebutan *Seafood Import Monitoring Program (SIMP)*.

---

<sup>4</sup>“Volume Ekspor Hasil Perikanan Indonesia ke Amerika Serikat 2009 - 2013”. Katadata.co.id. Diakses 3 Maret 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/volume-ekspor-hasil-perikanan-indonesia-ke-amerika-serikat-2009-2013>

<sup>5</sup>Muhammad Naufal Abdurrasyid, “Analisis Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat Era Presiden Barack Obama Terhadap Praktik Forced Labour Di Industri Perikanan Thailand 2009-2014”, *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 3. 2016

## 1.2. Identifikasi Masalah

### 1.2.1. Deskripsi Masalah

Sejalan dengan berkembangnya zaman, teknologi penangkapan dan budidaya perikanan mengalami perkembangan yang pesat, hal ini didorong oleh adanya peningkatan permintaan dan kebutuhan pasar atau konsumen terhadap produk perikanan yang menciptakan pertumbuhan produksi dan perdagangan pada komoditas produk perikanan. Fenomena akan peningkatan pertumbuhan konsumsi dan produksi ini membuat ketertelusuran produk menjadi salah satu dari persyaratan yang dapat menentukan dan menjamin kualitas dan keamanan pada produk perikanan. Ketertelusuran didefinisikan Komisi Codex Alimentarius sebagai kemampuan untuk menelusuri perjalanan pangan dari tahapan produksi, pengolahan sampai distribusi.<sup>6</sup>

Ketertelusuran dapat menjadi instrumen utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik perdagangan produk perikanan dari hasil *IUU fishing* dan *seafood fraud* ini kemudian dijadikan sebagai persyaratan yang termuat dalam kebijakan pengaturan perdagangan negara-negara di dunia termasuk Amerika Serikat melalui kebijakan SIMP. Praktik *IUU fishing* dan *seafood fraud*, seta kerusakan ekosistem laut dapat mengancam keberlanjutan sektor perikanan yang memiliki peran penting dalam ketersediaan pangan global dan ekonomi bagi masyarakat pesisir pantai. *IUU fishing* dan *seafood fraud* berupa pemalsuan atau misinformasi terkait dengan label, berat, jenis serta ukuran yang tidak sesuai

---

<sup>6</sup> Dwiwitno. "Implementasi Sistem Ketertelusuran Pada Produk Perikanan" Squalen Bulletin of Marine and Fisheries Postharvest and Biotechnology Vol. 4 No. 3. 2009

maupun adanya penambahan bahan yang tidak sesuai ini merupakan tindakan-tindakan ilegal yang menimbulkan kerugian ekonomis. Disamping kerugian ekonomi, *seafood fraud* juga dapat berdampak pada permasalahan kesehatan konsumen terutama bagi konsumen yang memiliki riwayat alergi pada beberapa jenis ikan atau produk perikanan tertentu.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut maka keputusan Amerika Serikat menetapkan SIMP sebagai langkah pencegahan dari masuknya produk perikanan yang ditangkap dari hasil praktik *IUU fishing* dan *seafood fraud* dapat membantu Amerika Serikat dalam mempromosikan rantai pasokan perikanan yang adil dan etis serta menjamin kualitas dan keamanan produk perikanan bagi konsumen.

Dengan adanya penetapan SIMP yang merupakan regulasi yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk masuknya produk perikanan ke pasar Amerika Serikat maka Indonesia memiliki kepentingan dalam kebijakan SIMP tersebut mengingat bahwa Indonesia merupakan negara eksportir utama untuk produk perikanan ke Amerika Serikat. Menjadikan Amerika Serikat pasar utama untuk produk perikanan, maka dengan adanya persyaratan SIMP dapat mempengaruhi ekspor produk perikanan Indonesia. Ketertelusuran merupakan salah satu persyaratan SIMP dan merupakan aspek yang penting karena jika ketelusuran rantai pasokan terhadap produk perikanan tidak bisa dipenuhi maka akan terjadi penolakan pada produk yang diekspor ke Amerika Serikat. Oleh karena itu untuk memenuhi persyaratan ketertelusuran dalam SIMP maka Indonesia harus menjaga produk perikananannya bebas dari praktik *IUU fishing* dan

---

<sup>7</sup> Jack Cheney. "The Irony of Oceana's Seafood Fraud Campaign", 15 November 2018. diakses pada 3 Maret 2022. <https://sustainablefisheries-uw.org/seafood-fraud-oceana/>

*seafood fraud* melalui pendokumentasian dan pencatatan rantai pasokan pada produk perikanan. Untuk dapat melakukan hal tersebut maka nelayan dan produsen atau pengusaha perikanan dan lembaga pemerintah dapat memanfaatkan teknologi ketertelusuran dalam sektor perikanan. Tetapi hal ini menjadi permasalahan bagi Indonesia yang mayoritas aktivitas perikanan didominasi oleh usaha skala kecil yang memiliki keterbatasan dalam pengadaan dan penggunaan teknologi.<sup>8</sup> Tingkat teknologi yang rendah dalam proses ketertelusuran penangkapan atau produksi, pengolahan dan distribusi dapat menyulitkan para pelaku usaha perikanan untuk dapat memenuhi persyaratan yang termuat pada aturan SIMP. Oleh karena itu melihat adanya hambatan tersebut, perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan hal ini diupayakan Indonesia dengan bantuan dukungan Amerika Serikat melalui proyek *USAID Oceans and Fisheries Partnership*.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi di dalam konteks kerjasama proyek *USAID Oceans and Fisheries Partnership* dalam upaya mendukung Indonesia dalam menghadapi hambatan teknis perdagangan *Seafood Import Monitoring Program* Amerika Serikat dengan studi kasus Bitung dalam kurun waktu 2015 sampai 2020. Pemilihan lokasi tersebut dipilih penulis karena Bitung merupakan satu-satunya lokasi di Indonesia yang dipilih sebagai *learning sites* yaitu lokasi pembelajaran dan demonstrasi dari proyek *USAID Oceans and*

---

<sup>8</sup> Masyhuri Imron “Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan” Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No. 1. 2013

*Fisheries Partnership*. Dan rentang waktu antara 2015 sampai 2020 dipilih karena pertimbangan bahwa proyek tersebut dilaksanakan pada Mei 2015 dan berakhir pada Juni 2020.

### **1.2.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan topik dan penjelasan latar belakang permasalahan maka pertanyaan penelitian yang akan berusaha dijawab oleh peneliti :

“Bagaimana proyek *USAID Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans)* mendukung Indonesia dalam menghadapi hambatan teknis perdagangan *Seafood Import Monitoring Program (SIMP)* Amerika Serikat di tahun 2015-2020 ?”

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk menggambarkan proyek *USAID Oceans and Fisheries Partnership* dalam upaya mendukung Indonesia dalam menghadapi hambatan teknis perdagangan *Seafood Import Monitoring Program* Amerika Serikat.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan yaitu pertama, menambah sumber akademik bagi Universitas Katolik Parahyangan. Kedua, dapat menjadi kontribusi dan bahan referensi baru untuk dunia pendidikan, khususnya bagi mereka yang tertarik untuk mengetahui bagaimana proyek *USAID Oceans and Fisheries*

*Partnership* dalam upaya mendukung Indonesia dalam menghadapi hambatan teknis perdagangan *Seafood Import Monitoring Program* Amerika Serikat.

#### 1.4. Kajian Literatur

Sebagai acuan dan kajian literatur, penulis kemudian menggunakan tiga literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Sara G. Lewis dan Mariah Boyle<sup>9</sup> dalam penelitiannya “*The Expanding Role of Traceability in Seafood: Tools and Key Initiatives*” Lewis dan Boyle menjelaskan berbagai isu yaitu pertama motivasi adanya perkembangan akan penggunaan ketertelusuran makanan laut secara global. Kedua, berhubungan dengan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan ketertelusuran makanan laut beserta dengan contoh inisiatif yang dapat dilakukan dalam mendukung peningkatan ketertelusuran makanan laut.

Munculnya pemberlakuan persyaratan ketertelusuran oleh negara-negara seperti yang dilakukan oleh kedua pasar global terbesar untuk impor makanan laut yaitu Uni Eropa melalui sertifikasi kesehatan dan ketersediaan data terkait dengan penanganan dan praktik yang menjamin keamanan pangan untuk semua produk makanan laut yang diimpor dan Amerika Serikat melalui *Seafood Import Monitoring Program* (SIMP) lahir dari keprihatinan terhadap isu-isu *seafood fraud* dan *IUU fishing* menjadi permasalahan global. Pelanggaran hak asasi manusia dimana kasus seperti kondisi kerja yang tidak aman, kekerasan, kerja

---

<sup>9</sup>Sara G. Lewis dan Mariah Boyle “The Expanding Role of Traceability in Seafood: Tools and Key Initiatives”. *Journal of Food Science* Vol. 82, 2017 Nr. S1. 13-19.  
<https://doi.org/10.1111/1750-3841.13743>

paksa tanpa upah, dan perdagangan manusia dan anak banyak terjadi dalam industri perikanan serta berkembangnya *Fishery Improvement Projects* (FIPs) menandakan adanya transisi meningkatnya komitmen untuk menciptakan perikanan yang berkelanjutan. Contoh beberapa sistem yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk mulai menerapkan protokol ketertelusuran yang diantaranya adalah Pemantauan Kapal Perikanan (*Vessel Monitoring System* atau VMS), *Electronic logbooks*, dan *Electronic monitoring*. Lewis dan Boyle juga mengatakan perlu adanya kerjasama kemitraan publik-swasta dan kolaborasi lintas sektor yang dicontohkan melalui komitmen publik untuk meningkatkan keberlanjutan dan ketertelusuran berbagai makanan laut segar dan beku yang dilakukan oleh perusahaan ritel Amerika seperti Target.<sup>10</sup>

*Adinda Kusumawati*<sup>11</sup> menjelaskan terkait dengan respon pemerintah Cina terhadap program ketertelusuran SIMP Amerika Serikat dalam artikel jurnal yang berjudul “*Respon Pemerintah Cina Terhadap Kebijakan Seafood Import Monitoring Program (SIMP) Amerika Serikat*”. Pembahasan dalam tulisan ini pertama menekankan pada motivasi Amerika Serikat memberlakukan SIMP terutama terhadap ekspor perikanan Cina. Kedua, tanggapan Cina terhadap SIMP yang dianggapnya sebagai kendala.

Cina merupakan importir utama perikanan untuk Amerika Serikat, yang mengekspor produk perikanan dari hasil penangkapan ilegal terutama untuk produk salmon, cumi-cumi dan pollock ke pasar Amerika Serikat. Departemen

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup>Adinda Kusumawati “Respon Pemerintah Cina Terhadap Kebijakan Seafood Import Monitoring Program (SIMP) Amerika Serikat”. JOM FISIP Vol. 8: Edisi II. 2021.

luar negeri Amerika Serikat bahkan mencatat bahwa nelayan Cina merupakan salah satu dari pelaku penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan menyalahi aturan terburuk di dunia yang seringkali melakukan pengabaian terhadap tindakan pengelolaan perikanan. Hal ini memicu tindakan Amerika Serikat yang lebih selektif terhadap produk makanan laut yang masuk ke dalam pasar Amerika Serikat yang diwujudkan melalui pemberlakuan kebijakan SIMP. Pemberlakuan kebijakan SIMP menjadi kendala yang besar untuk Cina. Cina merespon kebijakan SIMP dengan memenuhi persyaratan yang ada seraya melakukan perbaikan aturan domestik Cina diantaranya mengeluarkan aturan tambahan. Cina terus meningkatkan aturan agar para pelaku DWF melaksanakan VMS dan mewajibkannya sebagai syarat untuk melakukan pemancingan jarak jauh. Cina juga melakukan amandemen kelima terkait Undang-undang Perikanan yang telah diberlakukan sejak tahun 1986 dan memberikan kejelasan aturan terhadap pelanggar. Cina juga mewajibkan produsen untuk melaporkan produksi perikananannya satu kali dalam satu bulan. Ketegasan Cina ini kemudian diimplementasikan Cina pada tahun 2017 dimana Cina untuk pertama kalinya mengumumkan pembuatan sistem daftar hitam bagi perusahaan dan kapal DWF.<sup>12</sup> Kusumawati menggunakan teori proteksionisme yang dikemukakan oleh Alexander Hamilton dan kemudian dikembangkan oleh Friedrich List. Proteksionisme diartikan sebagai upaya negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan melindungi pasar dalam negerinya.<sup>13</sup> Teori ini dipakai oleh Kusumawati untuk menjelaskan motivasi Amerika Serikat dalam memberlakukan

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Robert Jackson dan Georg Serenson. *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan Edisi Kelima*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

kebijakan SIMP terhadap impor produk perikanan dimana SIMP dianggap sebagai implementasi bentuk perlindungan Amerika Serikat terhadap perekonomian domestiknya.

Selain Cina, pemberlakuan SIMP juga menjadi tantangan dan peluang bagi para pelaku usaha perikanan Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh *Fauziyah Sri Marlina*<sup>14</sup> dalam artikel jurnal yang berjudul “*Upaya Indonesia Dalam Menghadapi Hambatan Teknis Perdagangan: Seafood Import Monitoring Program Terhadap Ekspor Perikanan Indonesia Ke Amerika Serikat Tahun 2014-2018*”. SIMP yang dikembangkan oleh Amerika Serikat memberikan hambatan internal dan eksternal bagi kegiatan ekspor perikanan Indonesia untuk mengatasi hambatan tersebut diwujudkan Indonesia melalui pertama yaitu dengan melakukan sosialisasi yang ditunjukkan untuk para *stakeholder* Indonesia. Kedua, yaitu diwujudkan Indonesia melalui negosiasi dengan Amerika Serikat sebagai upaya Indonesia dalam menghadapi SIMP sebagai hambatan eksternal bagi kegiatan ekspor perikanan Indonesia. Ketiga untuk mendukung persyaratan ketertelusuran, Pemerintah Indonesia juga melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan peraturan domestik Indonesia dan meminta pengembangan kapasitas kepada Amerika Serikat.

Indonesia memberikan sosialisasi regulasi SIMP kepada stakeholder dan pelaku usaha perikanan Indonesia dan mengundang NOAA maupun importir Amerika Serikat sebagai pemateri untuk memberikan sosialisasi terkait penerapan

---

<sup>14</sup> Fauziyah Sri Marlina “Upaya Indonesia Dalam Menghadapi Hambatan Teknis Perdagangan: Seafood Import Monitoring Program Terhadap Ekspor Perikanan Indonesia Ke Amerika Serikat Tahun 2014-2018” JOM FISIP Vol. 8: Edisi I. 2021.

regulasi SIMP. Hal ini menjadi langkah yang diambil Indonesia dalam mengatasi hambatan internal yang dialami Indonesia diantaranya adalah kurang siapnya nelayan dalam mengikuti protokol pengiriman produk perikanan ke Amerika Serikat. Untuk mengatasi hambatan eksternal Indonesia melakukan upaya melalui negosiasi dengan mengangkat isu ini pada setiap pertemuan yang dilaksanakan dengan Amerika Serikat baik dalam pertemuan bilateral, regional dan forum internasional. Negosiasi ini dilakukan dalam lingkup bilateral dan tidak dilakukan pada tingkat perundingan WTO dengan maksud untuk menyampaikan kepentingan Indonesia sebagai upayanya dalam meminimalisir hambatan yang ditimbulkan dari persyaratan ketertelusuran SIMP. Indonesia berhasil menegosiasikan perihal pemberian tenggang waktu satu tahun bagi negara-negara importir dalam memenuhi persyaratan regulasi SIMP dan mengupayakan permohonan pengadaan pengembangan kapasitas kepada Amerika Serikat. Dalam mendukung persyaratan ketertelusuran pemerintah Indonesia terus melakukan penyesuaian terkait dengan peraturan domestik dan permintaan pengadaan pengembangan kapasitas. Contohnya dengan menerbitkan surat edaran nomor yang berisi pedoman pengisian formulir sertifikat SIMP Amerika Serikat; serta pengimplementasian *logbook*. Marlina menggunakan teori proteksionisme yang dipelopori oleh Friedrich List yang beranggapan bahwa negara berperan penting dalam melindungi produk domestik, dengan mengambil kepentingan nasional sebagai salah satu gagasan utama dalam teori proteksionisme dimana kepentingan nasional ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku politik luar negeri sebuah

negara dalam melaksanakan hubungan kerja sama perdagangan internasional dengan negara lainnya.<sup>15</sup>

Ketiga artikel jurnal termasuk kedalam kelompok yang menggaris bawahi adanya urgensi untuk penerapan persyaratan ketertelusuran pada pasokan makanan laut yang mulai dikembangkan oleh negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan ketiga artikel jurnal, penulis setuju bahwa persyaratan ketertelusuran dapat menjadi langkah yang dapat diambil dalam memerangi maraknya praktik *IUU fishing*, *overfishing* dan *seafood fraud* yang dapat mengancam kelestarian sumber daya perikanan dan konsumen, namun penulis juga menyadari ada juga hambatan yang bisa timbul dari dibalik penerapan persyaratan ketertelusuran seperti yang diungkapkan oleh Kusumawati dan Marlina. Oleh karena itu penulis menyetujui perlu adanya inisiatif ketertelusuran berupa pengembangan investasi baik dalam bentuk bantuan yang dapat mendukung praktik dan teknologi ketertelusuran dalam sektor perikanan yang dilakukan oleh negara-negara yang memberlakukan persyaratan ketertelusuran kepada negara-negara yang terdampak dari adanya aturan tersebut seperti negara pengekspor makanan laut. Dan hal ini perlu dilakukan melalui kolaborasi.

Berbeda dengan yang telah dilakukan oleh Marlina dimana lebih menyoroti pada upaya negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia. Pada skripsi ini, penulis memilih proyek kerjasama *USAID Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans)* sebagai studi kasus dari bentuk upaya Amerika Serikat dalam

---

<sup>15</sup> Robert Jackson dan Georg Serenson. op.cit.

memberikan bantuan untuk mendukung Indonesia dalam menghadapi hambatan teknis perdagangan SIMP Amerika Serikat.

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai pedoman untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Merkantilisme merupakan salah satu teori dari sistem perdagangan internasional yang mulai muncul sekitar abad pertengahan. Menurut Eli Heckscher<sup>16</sup> merkantilisme sangat identik dengan sistem nasionalisme. Dimana kekuatan nasional (*national power*) mengambil bagian penting dalam pembangunan negara. Negara bergerak untuk menjalankan kepentingan nasional dengan melakukan upaya untuk melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya, hal ini karena kepentingan ekonomi merupakan unsur penting dari *power* suatu negara. Oleh karena itu, tidak lepas dari pemikiran ekonomi, dalam penerapan merkantilisme sebagai sistem kekuasaan, penggunaan kebijakan ekonomi pun harus dibuat untuk mencapai pemenuhan dari tujuan peningkatan *power* negara.<sup>17</sup> Dalam praktik perdagangan internasional saat ini, proteksionisme merupakan warisan dari sistem merkantilisme yang kemudian banyak dipakai negara sebagai kebijakan ekonomi untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dalam melakukan transaksi internasional. Proteksionisme diartikan sebagai upaya negara merumuskan kebijakan ekonomi, yang dalam penerapannya dilakukan sedemikian rupa untuk melindungi pasar domestik dari

---

<sup>16</sup> Heckscher, Eli F. *Mercantilism vol. 2* (London: Allen and Unwin, 1935). hal 13

<sup>17</sup> Ibid, hal 17.

dominasi produk asing.<sup>18</sup> Kebijakan proteksionisme ini kemudian diberlakukan melalui penerapan hambatan perdagangan, berupa tarif (*tariff barrier*) dan non tarif (*non-tariff barrier*).

Hambatan tarif secara historis merupakan hambatan yang paling penting dalam terciptanya hambatan perdagangan. Tarif memiliki pengertian pajak atau bea yang dikenakan pada komoditas yang diperdagangkan melewati lintas batas teritorial negara.<sup>19</sup> Berbeda dengan tarif, hambatan perdagangan non-tarif adalah semua hambatan bukan tarif yang membatasi arus perdagangan internasional, sehingga dapat menimbulkan ancaman bagi sistem perdagangan dunia.<sup>20</sup> Dalam perkembangannya banyak pemerintahan lebih memilih untuk menerapkan hambatan non-tarif. Hal ini dikarenakan menurut Deardorff tarif dianggap kurang efektif dalam mengurangi impor dan membantu para pengusaha dan pekerja yang dirugikan karena impor. Dirinya juga menilai alih-alih mengenakan tarif akan lebih efektif jika kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan berupa hambatan non-tarif kuantitatif.<sup>21</sup> Alasan lainnya diungkapkan oleh Xianping Yuan dan Yuanyuan Zhang ketika hambatan tarif mengalami penurunan kekuatan untuk dipengaruhi maka negara maju (*developed countries*) memanfaatkan hambatan non-tarif yaitu hambatan teknis (*technical barriers to trade* atau TBT) untuk melindungi produsen domestik dari persaingan produk-produk impor yang masuk

---

<sup>18</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D. *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002) hal 57.

<sup>19</sup> Dominick Salvatore. *International Economics 11th Edition*. (New Jersey: Wiley, 2013), 222.

<sup>20</sup> Ibid, 261.

<sup>21</sup> Alan Deardorff dan Robert M. Stern. *Measurement of Nontariff Barriers*. (Michigan: Michigan Press, 1998)

kedalam pasar domestik.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep hambatan teknis untuk menjelaskan mengenai kebijakan Amerika Serikat, SIMP yang merupakan contoh dari pengimplementasian hambatan teknis yang dilakukan Amerika Serikat terhadap ekspor komoditas ikan dan olahan Indonesia.

Perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan (*Agreement on Technical Barriers to Trade* atau *TBT Agreement*)<sup>23</sup> memuat segala aturan dan prosedur berkaitan dengan hambatan non-tarif yaitu hambatan teknis (*technical barriers to trade* atau TBT). Dan berdasarkan perjanjian yang dikeluarkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization atau WTO) ini terdapat tiga jenis hambatan teknis yang diatur di dalam *TBT Agreement*. Ketiga jenis hambatan teknis tersebut diantaranya adalah regulasi teknis (*technical regulations*), standar (*standard*), dan prosedur penilaian kesesuaian (*conformity assessment procedure*).

Hambatan teknis yang diatur dalam *TBT Agreement* yaitu regulasi teknis (*technical regulation*) memiliki definisi sebagai berikut:<sup>24</sup>

*Document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method.*

---

<sup>22</sup> Xianping Yuan dan Yuanyuan Zhang (2018) “Brief Analyses of Technical Barriers to Trade—Based on the Case of Lighters in Wenzhou”. *Open Access Library Journal*, 5, 1-7. 2018. doi: 10.4236/oalib.1104352.

<sup>23</sup> Agreement on Technical Barriers to Trade

<sup>24</sup> Annex 1 Of Agreement on Technical Barriers to Trade

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga kriteria yang menjadikan kebijakan suatu peraturan pemerintah dapat dikatakan merupakan hambatan teknis. Kriteria pertama, ketentuan-ketentuan atau segala aturan-aturan yang bersifat teknis berkaitan dengan karakteristik produk, metode proses atau produksi termasuk ketentuan administratif yang berlaku harus tertulis atau berbentuk dokumen dan aturan dan ketentuan tersebut diterapkan kepada barang atau kelompok barang yang dapat diidentifikasi. Kedua yaitu aturan dan ketentuan dapat juga berupa persyaratan kandungan dalam sebuah produk yang harus memiliki satu atau lebih dari satu karakteristik yang secara langsung terkait dengan produk tersebut seperti persyaratan terminologi, simbol, pengemasan, penandaan, atau pelabelan. Kriteria ketiga adalah semua aturan dan ketentuan tersebut harus bersifat wajib dan memiliki kekuatan memaksa. Berkaitan dengan regulasi teknis, negara dapat memberlakukan regulasi teknis dengan memperhatikan beberapa hal yang diatur pada pasal 2 ayat (2) angka 2 *TBT Agreement* yaitu regulasi teknis tersebut tidak boleh ditunjukkan untuk menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu dan tujuan penerapannya dilandasi oleh tujuan dari hambatan teknis itu sendiri yaitu dilakukan demi keamanan nasional, perlindungan kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tanaman serta lingkungannya, dan atau untuk pencegahan praktik penipuan.<sup>25</sup>

Jenis kedua dari hambatan teknis yang diatur dalam *TBT Agreement* yaitu standar (*standard*) memiliki definisi sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Article 2: Preparation, Adoption and Application of Technical regulation by Central Government Bodies Of Agreement on Technical Barriers to Trade

<sup>26</sup> Annex 1 Of Agreement on Technical Barriers to Trade, op.cit.

*Document approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or related processes and production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they apply to a product, process or production method.*

Berdasarkan definisi diatas, maka suatu hambatan perdagangan dapat dikategorikan sebagai standar jika terdapat dokumen yang dibuat oleh badan pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk membuat peraturan, pedoman atau karakteristik untuk suatu produk terkait dengan proses dan metode produksi produk tertentu. Jika regulasi teknis bersifat wajib dan memaksa, sedangkan standar hanya berupa pedoman dan bersifat tidak memaksa.

Berikut merupakan definisi prosedur penilaian kesesuaian (*conformity assessment procedure*): “*Any procedure used, directly or indirectly, to determine that relevant requirements in technical regulations or standards are fulfilled.*”<sup>27</sup> Prosedur penilaian kesesuaian digunakan untuk menentukan suatu produk telah memenuhi persyaratan regulasi teknis atau standar yang relevan.

Tidak ada larangan bagi Negara-negara anggota WTO untuk menerapkan regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian asal dalam penerapannya harus mempertimbangkan kondisi negara berkembang dan menjamin bahwa penerapannya tidak menciptakan hambatan perdagangan internasional yang tidak perlu terutama menciptakan hambatan bagi ekspor negara berkembang.<sup>28</sup> Namun regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian yang berbeda-beda pada setiap negara tetap akan dapat menciptakan hambatan

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Article 12 : Special and Differential Treatment of Developing Country Members of Agreement on Technical Barriers to Trade

teknis yang tidak perlu dan tidak dapat dibenarkan untuk perdagangan. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi negara berkembang. Hong Gu dalam artikelnya menyatakan bahwa keterbelakangan teknologi dan manajemen yang dialami oleh negara berkembang menyulitkan negara berkembang untuk memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan negara maju. Tidak hanya itu untuk mencapai standar dan regulasi yang ditetapkan seringkali menuntut negara berkembang untuk mengeluarkan biaya yang besar juga.<sup>29</sup>

Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan kapasitas dan teknologi, negara-negara kemudian membutuhkan kerjasama dengan negara lainnya dan situasi hubungan internasional semacam ini ditandai dengan adanya kerjasama internasional. Kerjasama dapat terlaksana karena adanya hubungan yang dibangun dari persamaan tujuan atau adanya kepentingan yang selaras di antara para aktor atau negara-negara yang terlibat. Ketidakcocokan ataupun konflik dalam hubungan internasional memang ada dan tidak dapat dihindarkan, namun dapat ditekan jika kedua pihak yang bekerjasama dalam menyelesaikan masalahnya. Sifat dari kerjasama biasanya bermacam-macam seperti harmonisasi sampai integrasi yang merupakan sifat kerjasama yang paling kuat, namun setidaknya Menurut Brian Hocking dan Michael Smith<sup>30</sup> dalam hubungan internasional yang harmonis, kerjasama ini ditandai dengan adanya:

#### 1. Konsensus

---

<sup>29</sup> Hong Gu. "Technical Barriers to Trade and China's Trade". *Modern Economy*, 8, 1045-1055. 2017 doi: 10.4236/me.2017.88072.

<sup>30</sup> Brian Hocking dan Michael Smith. *World Politics: An Introduction to International Relations second edition* (New York:Routledge, 2014) hal 221.

Konsensus merupakan suatu hubungan yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.

## 2. Kolaborasi

Kolaborasi merupakan suatu hubungan yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang terlibat hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.

## 3. Integrasi

Integrasi merupakan hubungan yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali ditemukan adanya benturan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat.

Kerjasama internasional kemudian diwujudkan salah satunya melalui bantuan luar negeri. Michael Benarroch dan James D. Gaisford mengatakan bantuan luar negeri dapat menjadi solusi. Hal ini dikarenakan bantuan luar negeri dapat mempromosikan dan menjadi saluran bagi transfer pengetahuan, transfer teknologi, dan penyedia layanan publik.<sup>31</sup> Mengetahui keterbatasan teknologi dan manajemen ketertelusuran yang dimiliki negara-negara berkembang mitra dagang Amerika Serikat, maka melalui pendanaan USAID, Amerika Serikat menciptakan proyek *USAID Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans)* sebagai

---

<sup>31</sup> Benarroch, M. dan Gaisford, J. D. 'Foreign Aid, Innovation, and Technology Transfer in a North-South Model with Learning-by-Doing'. *Review of Development Economics* 8(3): 361–78. 2004 doi:10.1111/j.1467-9361.2004.00238.x

bantuan luar negeri yang diberikan Amerika Serikat untuk mendukung Indonesia yang merupakan negara dari target pembelajaran dan uji coba memiliki kesempatan yang besar untuk memanfaatkan bantuan luar negeri ini untuk membantu Indonesia menghadapi hambatan teknis SIMP.

Carol Lancaster<sup>32</sup> mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai transfer sumber daya yang dilakukan secara sukarela, dari suatu pemerintah ke pemerintah independen lainnya, organisasi nonpemerintah, atau organisasi internasional. Dan salah satu yang menjadi tujuan dari adanya bantuan luar negeri adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan dan mata pencaharian di negara penerima bantuan luar negeri. Sumber daya tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, hibah tunai, keringanan utang, atau dalam bentuk komoditas seperti makanan atau obat-obatan atau bahkan bisa dalam bentuk pendanaan proyek-proyek seperti pembangunan jalan, pembiayaan penelitian, sebagai insentif berbentuk dukungan anggaran bagi negara penerima atau bantuan teknis dan pelatihan di negara penerima.<sup>33</sup>

Berdasarkan penyalurannya Roger C. Riddell<sup>34</sup> menyebutkan bantuan luar negeri diberikan dalam berbagai jenis, secara tradisional sebagian besar bantuan tersebut disalurkan melalui *project aid*. Bantuan proyek (*project aid*) adalah bantuan yang diberikan melalui hibah (*grant*) untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, melibatkan partisipasi langsung donor dalam desain dan pelaksanaan proyek, namun dalam beberapa kasus *project aid* juga mendukung adanya

---

<sup>32</sup>Carol Lancaster dan Ann Van Dusen. *Organizing U. S. Foreign Aid*. (California: The Brookings Institution, 2005) hal. 6-7

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Riddell, R. C. *Does foreign aid really work?* (New York: Oxford University Press, 2007)

partisipasi dari pihak ketiga melalui lembaga (kontraktor) swasta atau organisasi nonpemerintah. *Project aid* memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan peran ‘*gap-filling*’ dengan menyediakan sumber daya, keterampilan, penyediaan barang, transfer pengetahuan dan sistem yang dibutuhkan dan tidak dimiliki oleh negara penerima bantuan (*recipient countries*). *Project aid* dapat disertai dan dilengkapi dengan tiga jenis bantuan diantaranya yaitu; *programme aid*, *technical assistance* dan *capacity building*. Berikut merupakan penjelasan dari ketiga jenis bantuan:<sup>35</sup>

1. Bantuan program (*program aid*)

Terdapat dua jenis bentuk *program aid* yang diminati oleh donor. Pertama adalah *sector-wide approach* (SWAp), dimana bantuan ditunjukkan untuk mendukung sektor tertentu dengan tujuan membantu pencapaian tujuan dan sasaran program pemerintahan negara penerima bantuan. Kedua, jenis bantuan *program aid* berikutnya yang banyak dipakai oleh donor adalah dukungan anggaran (*budget support*). *Budget support* merupakan bantuan dukungan yang disalurkan ke negara penerima melalui anggaran pemerintah negara penerima.

2. Bantuan teknik (*technical assistance*)

*Technical assistance* diberikan melalui penyediaan tenaga ahli, pelatihan, dan peralatan. *Technical assistance* bertujuan untuk mengisi kesenjangan keterampilan dan pengetahuan, dengan asumsi bahwa keterampilan dan pengetahuan ini sebagian besar berada di negara-negara donor, dan

---

<sup>35</sup> Ibid, hal 195.

keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki donor ini diperlukan untuk ditransferkan ke negara penerima bantuan.

3. Pengembangan kapasitas (*capacity building*).

*Capacity building* merupakan bantuan yang ditujukan untuk membangun, memperdalam dan meningkatkan kapasitas organisasi dan lembaga negara penerima bantuan. Dengan tujuan akhir menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Konsep bantuan luar negeri digunakan penulis untuk memetakan dukungan yang diberikan USAID dalam membantu Indonesia mengatasi hambatan teknis SIMP melalui proyek *USAID Oceans*, sebagaimana konsep *technical assistance* dan *capacity building* membantu dalam melihat fokus bantuan yang diberikan.

## **1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan dan memahami permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari penulis akan dikelola dan dianalisis berdasarkan interpretasi penulis yang mengacu pada prosedur dan penggunaan pertanyaan dalam menjelaskan hasil penelitian.<sup>36</sup> Penulis memilih metode penelitian kualitatif karena dapat memberikan berbagai pilihan serta ruang yang luas untuk membantu penulis dalam menjelaskan berbagai topik yang berkaitan dengan isu-isu politik, sosial dan ekonomi dalam

---

<sup>36</sup> John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (London : SAGE Publications, 2013) hal 4.

bentuk deskriptif yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu dan eksplanatif yang berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena yang diamati atau yang menjadi masalah.

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, berupa pengambilan data melalui pengumpulan data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang tersimpan seperti buku, artikel jurnal, majalah dan situs internet. Penulis memilih teknik studi kepustakaan dengan tujuan untuk menggali dan memanfaatkan informasi-informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti agar dapat mendukung proses penulisan.

## **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penelitian dibagi kedalam lima bab, masing-masing Babnya akan menjelaskan mengenai hal-hal berikut ;

### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang , identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II. Potensi dan Permasalahan Kelautan Dan Perikanan Indonesia**

Bab ini menggambarkan profil wilayah laut Indonesia, dan memberikan penjabaran terkait potensi kelautan dan perikanan Indonesia serta menjelaskan permasalahan yang dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan perikanan Indonesia.

### **Bab III. *Seafood Import Monitoring Program* Sebagai Hambatan Teknis Perdagangan Ekspor Perikanan Indonesia Ke Amerika Serikat**

Bab ini menjelaskan motivasi Amerika Serikat menerapkan *Seafood Import Monitoring Program* dan membahas secara keseluruhan terkait dengan regulasi *Seafood Import Monitoring Program* (SIMP) Amerika Serikat dan menjelaskan kinerja ekspor perikanan Indonesia ke Amerika Serikat serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi kebijakan *Seafood Import Monitoring Program* (SIMP) Amerika Serikat.

### **Bab IV. Proyek *USAID Oceans* Untuk Mendukung Indonesia Menghadapi Hambatan Teknis *Seafood Import Monitoring Program***

Bab ini menjelaskan hambatan Indonesia dalam memenuhi Syarat Ketertelusuran dalam SIMP, serta memberikan penjelasan terkait dengan pemilihan Bitung sebagai *learning sites* dari Proyek *USAID Oceans* dan implementasi proyek *USAID Oceans* untuk mendukung Indonesia menghadapi hambatan perdagangan *Seafood Import Monitoring Program* dengan studi kasus Bitung.

## **Bab V. Kesimpulan**

Bab ini memaparkan kesimpulan yang memuat jawaban dari pertanyaan penelitian yang dipilih berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan teori yang dipilih dalam penelitian dan saran yang diusulkan penulis.